

## DAFTAR PUSTAKA

- Burton, B, Ilyas. (2013). *Hukum Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Christy, M, Masias. 2013. *Menghitung Potensi Pajak Hotel Di Kota Kendari*. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Davey, Nick. 1989. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanullah*. Jakarta: UI Press.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dharsana, Muhammad Try. 2017. *Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Kepmendagri, Nomor 690.900-327, Tahun 2006, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Lombogia, A. 2016. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, (Online), Vol. 4, No. 2, Hal. 530 – 537.
- Mardani, Rizki Sri. 2017. *Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*. Skripsi Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Maulana, Ahmad Syahrir. 2013. *Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu*. Skripsi. Makassar: DEPARTEMEN Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin..
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Makassar dalam Angka tahun 2014. 2015. Makassar: Badan Pusat Statistik. Kota Makassar.
- Makassar dalam Angka tahun 2015. 2016. Makassar: Badan Pusat Statistik. Kota Makassar.
- Makassar dalam Angka tahun 2016. 2017. Makassar: Badan Pusat Statistik. Kota Makassar.
- Makassar dalam Angka tahun 2017. 2018. Makassar: Badan Pusat Statistik. Kota Makassar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel.
- Rahayu, Betty dan Purwanti Evi. 2011. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul*.
- Rahmanto, Agus. 2007. *Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004*. Skripsi. Semarang: DEPARTEMEN Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Riality, Amran, dan Kasmida. 2018. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) Kota Makassar. *Jurnal Riset Perpajakan* (Online). Vol.1, Nomor.2, Hal. 67-77.
- Siahaan, MARIHOT P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah—Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Suparnyo, 2012. *Hukum Pajak (Suatu Sketsa Asas)*. Semarang: Pustaka Magister.
- Syafarudin, Alwi. 1989. *Alat-alat Analisis dalam Pembelajaran*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Undang-Undang 1945 Pasal 23 ayat 2 Segala Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang*. 1945. Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 1997. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. 2009. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Waldy, John. 2016. *Analisis Potensi Pajak Kamar Hotel Di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: DEPARTEMEN Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Walakandou, R.J. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, (Online), Vol. 1, No. 3, Hal. 722 – 729.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1****BIODATA****IDENTITAS DIRI**

Nama : Muhammad Fernaldy Angghada N.R  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 24 September 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat Rumah : Perumahan Taman Mahkota Mas 2 Blok  
B8/10  
Telpon Rumah dan HP : 0895803015222  
Alamat E-mail : muhfernaldyangghada@yahoo.co.id

**Riwayat Pendidikan**

- a. Pendidikan Formal
- 2003 – 2009 : SD Impres Antang 1 Makassar
  - 2009 – 2012 : SMP Negeri 13 Makassar
  - 2012 – 2015 : SMA Negeri 5 Makassar
  - 2016 – Sekarang : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin Makassar
- b. Pendidikan Nonformal
- LK 1 Ikatan Mahasiswa Akuntansi FEB-UH

**Riwayat Organisasi**

- Anggota Tim Futsal Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin  
2016-2020

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 19 Juni 2020

Muhammad Fernaldy Angghada N.R

**LAMPIRAN 2****ANGGARAN DAN REALISASI PAJAK HOTEL DI KOTA MAKASSAR**

Pajak Hotel	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2014	75.164.615.000	50.533.548.736	67%
2015	81.208.967.000	50.128.251.234	61,73%
2016	138.182.620.000	70.521.682.850	51,04%
2017	142.000.000.000	92.970.091.185	65,47%
2018	130.000.000.000	103.142.302.558	79,34%

*Sumber: Badan Pendapatan Kota Makassar, 2020*

**LAMPIRAN 3****DAFTAR HOTEL DAN PENGINAPAN DI KOTA MAKASSAR**

No	Klasifikasi Hotel	Tahun				
		2018	2017	2016	2015	2014
1.	Penginapan	161	100	140	223	282
2.	Hotel Melati	48	24	34	57	101
3.	Hotel Bintang 1	19	14	16	23	13
4.	Hotel Bintang 2	37	27	33	34	23
5.	Hotel Bintang 3	49	45	28	30	26
6.	Hotel Bintang 4	17	19	9	10	7
7.	Hotel Bintang 5	2	3	2	2	2
Total		333	232	271	377	454

Sumber: BPS Kota Makassar

#### LAMPIRAN 4

##### Hasil Wawancara

1. Nama : Harryman  
Jabatan : Kepala Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Makassar  
Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar  
Hari/Tanggal : Selasa/03 Maret 2020  
Waktu : 14.00 WITA

##### Pertanyaan :

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak hotel yang ada di kota Makassar?

Jawab :

Pemungutan pajak hotel di kota Makassar memiliki dua sistem pemungutan yaitu Self Assesment dan Official Assesment. Self Assesment seperti beberapa hotel berbintang yang sudah memiliki laporan keuangan yang tetap dan di berikan kewenangan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang akan di setor ke pemerintah sedangkan Official Assesment dengan membayar sejumlah nilai yang sudah di tetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar karena hotel tersebut belum memiliki laporan keuangan tetap.

2. Apakah terdapat kendala yang dihadapi petugas Dinas Pendapatan Kota Makassar dalam pemungutan Pajak hotel di Kota Makassar?

Jawab :

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara. Padahal pajak sudah diatur dalam perundang-undangan dan masyarakat akan dikenakan sanksi apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Masih adanya pihak hotel yang belum mengetahui aturan-aturan perhitungan pajak hotel yang harus dibayarkan dan berbagai bentuk pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hotel.

Terdapat selisih dalam hal penentuan pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak hotel, karena pemerintah daerah yang hanya berdasarkan pada tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan target penerimaan pajak hotel.

3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Makassar?

Jawab :

Sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah daerah kota Makassar dengan cara mengupayakan kota Makassar untuk menjadi daerah tujuan wisata dan kota dunia yang dimana diketahui semakin banyaknya tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi ketika berada di kabupaten Maros dan dengan diperhatikannya salah satu faktor pendukung pajak hotel yaitu pariwisata akan memberi dampak yang baik pula terhadap penerimaan pajak hotel di kota Makassar.



2. Nama : Baharuddin Rachman  
Jabatan : Petugas Pemungutan Pajak BAPENDA  
Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar  
Hari/Tanggal : Sabtu/16 Mei 2020  
Waktu : 10.00 WITA

#### Pertanyaan

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak hotel yang ada di kota Makassar?

Jawab :

Pemungutan pajak hotel di kota Makassar memiliki dua sistem pemungutan yaitu Self Assesment dan Official Assesment. Self Assesment seperti beberapa hotel berbintang yang sudah memiliki laporan keuangan yang tetap dan di berikan kewenangan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang akan di setor ke pemerintah sedangkan Official Assesment dengan membayar sejumlah nilai yang sudah di tetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar karena hotel tersebut belum memiliki laporan keuangan tetap.

2. Apakah terdapat kendala yang dihadapi petugas Dinas Pendapatan Kota Makassar dalam pemungutan Pajak hotel di Kota Makassar?

Jawab :

waktu yang tersedia untuk kegiatan pendataan dan pendaftaran dalam pelaksanaan sangatlah terbatas yaitu 5 hari sedangkan pelaksanaan kegiatannya mendata dilakukan terhadap semua objek pajak, masih kurangnya juga kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, pemungutan pajak hotel ditentukan setelah mengambil data dari wajib pajak, namun sering kali wajib pajak menolak untuk membayar pajak dengan alasan ketetapanannya terlalu besar sehingga menyebabkan pajak hotel tidak dapat mencapai target, selain itu kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang kegunaan pajak bagi pembangunan daerah oleh karena itu sosialisasi perlu dilaksanakan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Makassar?

Jawab :

Yang pertama stabilitas keamanan yaitu membuat kota makassar ini nyaman untuk pendatang karena pendatang pastinya akan menginap dihotel, yang kedua memperbanyak event-event yang ada di kota Makassar, yang ketiga perbanyak destinasi-destinasi pariwisata yang bisa nantinya meraup orang orang untuk datang di kota Makassar, yang keempat dukungan dari pemerintah pusat sehingga diadakannya juga event-event di kota Makassar.